

ABSTRAK

Latar belakang : Sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi. Agar terwujud sumber daya manusia yang profesional dan termotivasi dalam bekerja perlu diberikan penghargaan. Sebagian tenaga kesehatan (90%) di Amerika Serikat melaporkan bahwa mereka telah menjadi lebih termotivasi sebagai konsekuensi dari pembayaran insentif yang mereka terima yang berasal dari dana *cost sharing*. Pada bulan April 2014, Walikota Baubau mengeluarkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Walikota Baubau Nomor 86 Tahun 2014 tentang pemberian insentif dokter umum dan dokter gigi pegawai negeri sipil lingkup Dinas Kesehatan Kota Baubau. Kebijakan Walikota Baubau tersebut menimbulkan reaksi dari tenaga kesehatan yang lain karena tidak memperhatikan aspek keadilan, aspek geografi, beban kerja dan kinerja dari tenaga dokter puskesmas di Kota Baubau.

Tujuan: Menganalisis proses dan implementasi kebijakan pemberian insentif dokter puskesmas di Kota Baubau.

Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif menggunakan rancangan studi kasus tunggal terjalın untuk menganalisis kebijakan pemberian insentif dokter puskesmas di Kota Baubau, yang difokuskan pada stakeholder, konteks kebijakan, isi kebijakan dan proses kebijakan.

Hasil: Stakeholder di Kota Baubau berperan aktif dalam proses dan implementasi kebijakan pemberian insentif dokter puskesmas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing; Faktor konteks kebijakan yang mempengaruhi adalah faktor struktural yang meliputi faktor politik yang dipengaruhi oleh janji politik Walikota terpilih saat kampanye pemilihan kepala daerah di Kota Baubau pada tahun 2012 dan faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah Kota Baubau yang hanya mampu memberikan insentif pada dokter puskesmas saja. Pemberian insentif dokter puskesmas di Kota Baubau berdasarkan kelangkaan profesi karena jumlah tenaga dokter yang masih terbatas. Proses kebijakan pemberian insentif dokter puskesmas di Kota Baubau dilakukan secara top down dari Pemerintah Daerah.

Kesimpulan: Pemberian insentif tenaga kesehatan di Kota Baubau hanya dapat dilakukan pada dokter puskesmas saja dengan pertimbangan kelangkaan profesi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Perlu dilakukan pengembangan insentif non finansial bagi tenaga kesehatan di Kota Baubau.

Kata Kunci : Analisis kebijakan, insentif, dokter puskesmas